

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kinerja Puskadaran DPD RI dalam pengelolaan data Asmasda masih belum efektif. Di samping itu, studi ini juga menawarkan kerangka model yang diharapkan dapat menunjang efektivitas kinerja Puskadaran DPD RI dalam pengelolaan data Asmasda. Adapun, terdapat dua (2) kesimpulan penting yang meringkas keseluruhan potret dari studi penelitian ini:

- 1) Kurang efektifnya berdasarkan empat pendekatan Stephen P. Robbins.

Pengelolaan data asmasda pada Puskadaran DPD RI telah berjalan sesuai dengan mekanisme kerja yang sudah ada. Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data asmasda yaitu Staf Ahli Anggota, Kepala Kantor Daerah, Staf Diamasda Puskadaran, dan Sekretariat Komite/PPUU/BULD juga telah menerima sosialisasi dari Puskadaran terkait mekanisme pengelolaan data asmasda. Namun begitu data asmasda yang masuk melalui web publikasmasda.go.id masih belum maksimal tertabulasi oleh Puskadaran. Hal ini disebabkan karena birokrasi pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara yurisdiktis tidak membenarkan Puskadaran menekan Staf Ahli Anggota selaku *start* awal untuk melakukan input data asmasda reses yang telah berhasil dihimpun oleh Anggota di daerah pemilihannya. Staf Ahli Anggota berada dibawah Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK) bukan dibawah Puskadaran. Akan tetapi menurut peneliti keadaan ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran Anggota yang masih belum kuat semuanya dalam konteks membangun sistem data asmasda.

Secara ilmiah, Puskadaran DPD RI perlu lebih memprioritaskan dan mengembangkan lebih banyak lagi nilai-nilai bersaing sebagai kriteria efektifitas pengelolaan data asmasda kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data asmasda dan stakeholders atas data asmasda. Menurut teori Stephen P. Robbins pendekatan nilai-nilai bersaing (*competing-values-approach*) bisa

menjadi salah satu ukuran dalam mengukur efektifitas pengelolaan data asmasda. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar ada diskusi mendalam dan penelitian tersendiri atas nilai-nilai kriteria efektifitas pengelolaan data asmasda yang bisa dikembangkan dalam mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan data asmasda.

Pada pendekatan pertama yakni pendekatan pencapaian tujuan tujuan ini sangat efektif pada pengelolaan data asmasda pada Puskadaran DPD RI. Bahwa tujuan yang ada sudah ada, sangat mewakili dan memenuhi perintah Tata Tertib DPD RI No.1 Tahun 2022. Hal ini juga terlihat dari rencana strategis yang sudah disusun oleh Puskadaran. Pada pendekatan sistem, pengelolaan data Asmasda pada pendekatan ini kurang efektif. Benar bahwa sistem dan dokumen pengelolaan asmasda sudah ada dan terlaksana dengan baik, namun tingkat kesadaran Anggota yang masih belum kuat semuanya dalam konteks membangun sistem data Asmasda dan Puskadaran tidak memiliki rentan kendali yang cukup dalam meningkatkan data asmasda. Selain itu, pada pendekatan ini juga memiliki kelemahan terutama benturan birokrasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga Puskadaran sering mengalami kendala dalam pengelolaan data Asmasda.

Pada pendekatan ketiga terbilang cukup efektif dalam pengelolaan data Asmasda. Terdapat 3 sasaran strategis capaian yang dihasilkan: 1) Sasaran strategis 1 untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pengguna website Asmasda, yang realisasinya berada di angka 100%; 2) Sasaran strategis 2 yakni optimalnya kualitas hasil penelitian produk dari DPD RI dengan memiliki basis akademis yang komperhensif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; 3) Optimalnya kualitas representasi melalui pengelolaan data Asmasda. Semua data yang dihasilkan dapat digunakan secara maksimal oleh Alat Kelengkapan DPD RI. Sedangkan pendekatan terakhir, terbilang cukup efektif, yakni seluruh staf memahami nilai-nilai yang terbentuk dalam kultur kerja Puskadaran DPD RI. Seluruh pihak yang terlibat memahami mekanisme pengelolaan asmasda, perencanaan telah berjalan dengan baik, ada hubungan yang jelas antara pihak yang menghimpun dengan keluaran hasil data asmasda dan tindak lanjutnya, hasil kajian dan rekomendasi asmasda dipaparkan dan mendapat respon dari Anggota serta dipakai sebagai rujukan untuk pembahasan RUU. Namun, pendekatan ini dinilai cukup kurang terutama dalam pengembangan kapasitas SDM para staf,

oleh karena itu, diperlukan peningkatan SDM untuk meningkatkan mutu dalam pengelolaan data Asmasda.

2) Kerangka model pengelolaan data Asmasda dalam menunjang efektivitas Puskadaran DPD RI

Untuk menangani persoalan efektivitas organisasi, maka perlunya mengadopsi dari kerangka akademis dan mengkontekstualisasikan ke dalam realitas objek penelitian. Dalam hal ini, kerangka model yang saat ini dibutuhkan oleh Puskadaran DPD RI dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data Asmasda, setidaknya harus memiliki tiga komponen yang harus dipenuhi, antara lain: 1) Pencapaian tujuan yang lebih kontekstual; 2) Struktur birokrasi pada Puskadaran DPD RI; 3) Inovasi kebijakan pada Puskadaran DPD RI.

Pencapaian tujuan menjadi hal yang krusial dalam persoalan suatu organisasi. Terlebih, pencapaian tujuan tidak sekedar menambahkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, melainkan seberapa jauh tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Pada komponen ini, setidaknya membutuhkan dua aspek: 1) Aspek standar operasional yang bisa dijalankan dan diwujudkan untuk mencapai tujuan organisasi; 2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang professional dalam meningkatkan mutu dalam pengelolaan data Asmasda. Dalam hal ini, Puskadaran sebagai organisasi yang berada di bawah naungan Setjen DPD RI, maka tiap-tiap bidang atau divisi yang berada dalam Setjen DPD RI perlu mengalami sinergitas tujuan dengan maksud mencapai tujuan besar yang tertuan dalam peraturan Tatib DPD RI.

Bagian penting dari penciptaan efektivitas organisasi adalah koordinasi yang integratif dari berbagai sub-sistem yang berbeda sehingga sistem-sistem dapat bekerja bersama-sama demi lancarnya pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, salah satu peranan yang harus diambil oleh Setjen DPD RI adalah melakukan terobosan untuk mengkoordinasikan antar sub-sistem yang berada di lingkungan organisasinya. Hal ini dapat memberikan manfaat berupa: 1) Dapat memberikan petunjuk untuk pembuatan keputusan rutin oleh para staf Puskadaran DPD RI, dengan demikian menjamin tingkat keseragaman dalam pengambilan keputusan

terutama pengelolaan data Asmasda; 2) Dapat meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Setjen DPD RI melalui identifikasi yang jelas mengenai kepentingan setiap kelompok/bidang kerja; 3) Dapat menjamin kesinambungan tindakan dalam perjalanan waktu dengan memanfaatkan pengalaman, dan mengurangi pengulangan-pengulangan dalam pengelolaan data Asmasda; 4) Mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan yang sama dalam pengelolaan data Asmasda.

Inovasi dalam suatu organisasi dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi demi tercapai tujuan-tujuan organisasi. Terobosan inovasi yang perlu dilakukan oleh Puskadaran melalui koordinasi "*calling*" terhadap Anggota DPD RI secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan berkonsultasi dengan pimpinan Setjen DPD RI untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut. Mekanisme *calling* dapat memantau kinerja DPD RI terutama dalam penginputan data Asmasda, karena input data Asmasda selama ini cukup kurang efektif, salah satunya disebabkan keterlambatan yang dilakukan oleh Anggota DPD RI. Selain itu, pemberian "*reward*" kepada Anggota DPD RI dalam penginputan data Asmasda juga menjadi penting untuk diimplementasikan.

B. Saran

1. Saran Kebijakan

Sehubungan dengan efektivitas Puskadaran DPD RI dalam pengelolaan data Asmasda dan kerangka model pengelolaan data Asmasda yang dapat menunjang efektivitas, maka peneliti memiliki dua (2) saran:

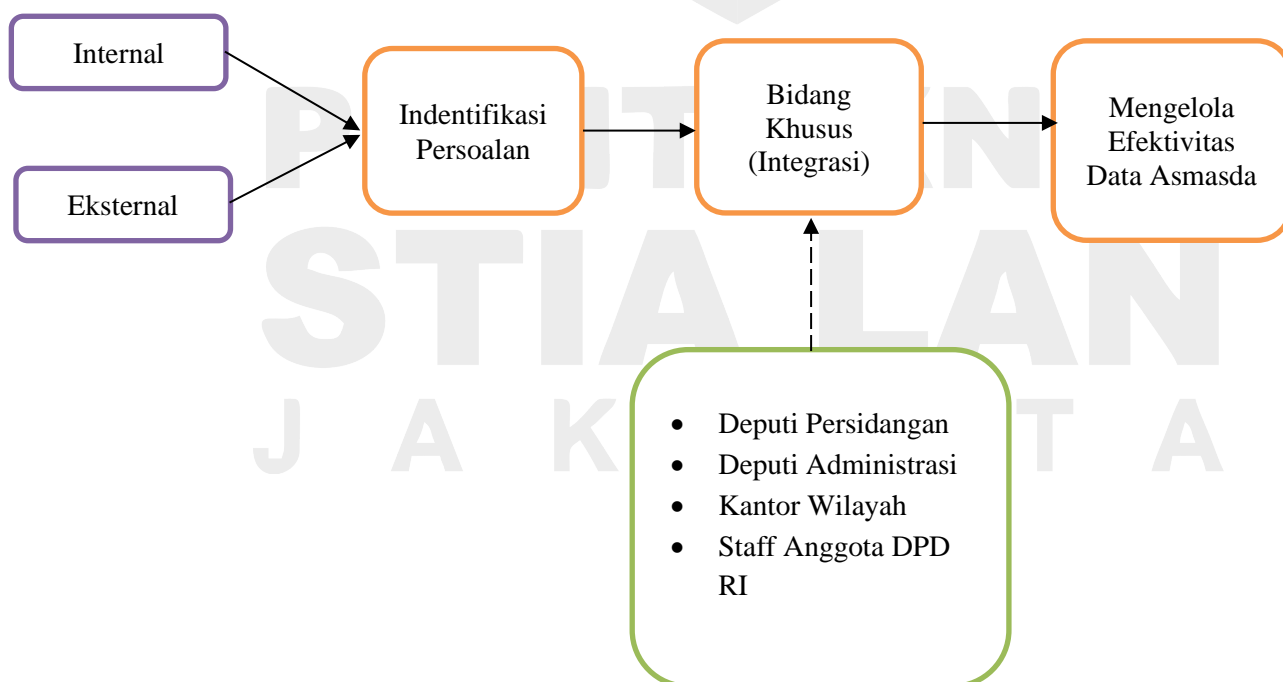
1) Untuk memenuhi tujuan representasi yang tertuan dalam Peraturan Tata Tertib No. 1 Tahun 2022, maka Puskadaran DPD RI harus memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan data Asmasda. Puskadaran DPD RI perlu melihat faktor yang melatarbelakangi mengapa pengelolaan data Asmasda tidak berjalan cukup efektif, baik faktor internal maupun eksternal. Perlunya audit yang menyeluruh untuk menilai persoalan apa saja yang paling berkontribusi terhadap efektivitas Puskadaran DPD RI dalam pengelolaan data Asmasda. Mengidentifikasi persoalan menjadi paling memiliki urgensi dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan

efektif dan efisien.

2) Puskadaran DPD RI perlu mempertimbangkan beberapa tawaran model kerja yang dihasilkan dari kajian akademis yang mendalam. Selain itu, Puskadaran DPD RI perlu membuat terobosan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan data Asmasda. Dengan membuat terobosan kebijakan, maka Puskadaran DPD RI dapat bertahan terus-menerus. Puskadaran DPD RI perlu menggandeng kelompok masyarakat untuk saling mengontrol terutama persoalan data Asmasda yang diperoleh dari Anggota DPD RI, sehingga Puskadaran DPD RI dapat merespon secara cepat hambatan-hambatan yang akan timbul.

Berikut, merupakan alur saran (rekomendasi) yang bersifat implementatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Asmasda pada Puskadaran DPD RI:

Gambar 5. 1 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Data Asmasda



Secara sederhana, saran (rekomendasi) kebijakan dapat dilaksanakan melalui skema di atas (Lihat Gambar 5.1), bahwa perlunya mengidentifikasi persoalan dalam efektivitas pengelolaan data Asmasda secara menyeluruh baik

dari aspek internal maupun eksternal. Identifikasi persoalan menjadi penting untuk memetakan persoalan yang terjadi dan tepat dalam mengoptimalkan pengelolaan data Asmasda. Kemudian tawaran yang dihadirkan adalah dengan membentuk bidang / biro khusus yang bersifat integratif antara berbagai bidang yang telah tersedia selama ini. Dengan membentuk bidang khusus yang berfokus pada pengelolaan data Asmasda maka efektivitas pengelolaan data Asmasda dapat tercapai dengan baik.

2. Saran Penelitian

Dalam menganalisis pengelolaan data Asmasda pada Puskadaran DPD RI digunakan empat (4) pendekatan utama yang berasal dari konsep Stephen P. Robbins tentang efektivitas organisasi. Namun, pendekatan ini tidak cukup komprehensif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data Asmasda. Berdasarkan riset penulis, perlunya keterhubungan (*linkage*) antara pendekatan yang melihat organisasi dengan pendekatan yang menitikberatkan pada kapasitas aktor yang berada dalam organisasi tersebut. Maka perlunya penelitian lanjutan yang dapat melengkapi kealpaan dari penelitian ini. Salah satunya adalah tentang penguatan kapasitas aktor dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Asmasda pada Puskadaran DPD RI. Efektivitas organisasi tentu dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh sistem lingkungan organisasi yang bekerja efektif dengan kemampuan dan kapasistas aktor dalam meningkatkan efektivitas organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N., & Maulana, A. (2020). Akuntabilitas Publik Anggota DPD RI dalam Menindaklanjuti Aspirasi Daerah (Studi Kasus Layanan Kesehatan Gratis Masyarakat Banten). *Jurnal Public Policy*, 6(2), 96–102. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2400>
- Ambarwati, A. (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi (I)*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Black, N. (2006). *Consensus Development Methods*. Oxford: Blackwell Publishing
- Bungin, M. B. (2011). *Penelitian Kualitatif. Prenada Media Grup (II)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- CNBC Indonesia. (2022, August 1). Jokowi Teken Pembentukan 3 Provinsi Baru Papua. Retrieved October 13, 2022, from [cnbcindonesia.com website: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220801085207-4-360015/sah-jokowi-teken-pembentukan-3-provinsi-baru-papua-ini-dia#:~:text=Tiga%20provinsi%20yang%20dimaksud%20antara,%2C%20dan%20UU%2016%2F2022](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220801085207-4-360015/sah-jokowi-teken-pembentukan-3-provinsi-baru-papua-ini-dia#:~:text=Tiga%20provinsi%20yang%20dimaksud%20antara,%2C%20dan%20UU%2016%2F2022).
- DPD RI. (2020). *Renstra Puskadaran DPD RI 2020-2024*. Jakarta.
- Erdina, T. V., & Hariani, D. (2017). Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(3).
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Garcia-Sanchez, I. M., Cuadrado-Ballesteros, B., & Frias-Aceituno, J. (2013). Determinants of Government Effectiveness. *International Journal of Public Administration*, 36(8), 567–577. <https://doi.org/10.1080/01900692.2013.772630>
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Handyaningrat, & Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2001). *Educational Administration: Theory, Research and Practice*. New York: McGraw Hill Inc.
- Institute for Data, D. & P. (2008). *Constituent Relationship Management for State Legislators*. Washington. Retrieved from www.csgwest.org.
- Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2017). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas

- Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(2). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.16214>
- Kurniadi, B. D. (2016). Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X. *Masyarakat Indonesia*, 4(1), 31–49.
- Margono, S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moenir, A. S. (1987). *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Muasaroh. (2010). *Aspek-aspek Efektivitas studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mulyasa. (2011). *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, N. (2012). *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia & Amerika Serikat: Rivalitas Kekuasaan Antara Presiden & Legislatif (2004-2009)*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
- Parlindungan, G. T. (2021). Aspirasi Masyarakat Daerah Sebagai Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Dijamin Konstitusi. *Ensiklopedia Social Review*, 3(1), 72–77. Retrieved from <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Puskada DPD RI. (2021). *Laporan Data Aspirasi DPD RI 2019 - 2021*. Jakarta.
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi (I)*. Jakarta: Arcan.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Indeks.
- Siagian, S. P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soetopo, H. (2010). *Perilaku Organisasi Teori dan Praktik Di Bidang Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Buku Seru.
- Tribunnews. (2022, July 11). Survei Catat Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR, DPD hingga Partai Politik Rendah. Retrieved October 12, 2022, from [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com) website: <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/11/survei-catat-tingkat->

kepercayaan-publik-terhadap-dpr-dpd-hingga-partai-politik-rendah

Trivena. (2002). *Analisis Efektivitas organisasi: Studi kasus pada Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur* (Tesis). Universitas Gadjah Mada, Sleman.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A